

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi saat ini menuntut adanya sistem akuntansi internasional yang dapat diberlakukan secara internasional di setiap negara, atau diperlukan adanya harmonisasi terhadap standar akuntansi internasional, sehingga adanya tujuan agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat diperbandingkan, mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan hubungan baik dengan pelanggan, supplier, investor, dan kreditor (Gamayuni, 2009). Kepentingan stakeholders sangat berpengaruh bagi kemajuan perusahaan, maka untuk melindungi kepentingan stakeholders diperlukan adanya peraturan tentang pengungkapan wajib dalam laporan keuangan karena tanpa peraturan ini dapat membuat perusahaan menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diungkapkan.

Mendorong adanya penelitian ini dikarenakan Pengungkapan dan transparansi pada laporan keuangan menjadi isu yang penting di Inonesia. *Forum for Corporate governance* (FCGI, 2006) mempublikasikan bahwa surei yang dilakukan oleh *PricewaterhouseCoopers* pada tahun 1999 terhadap investor international di Asia, yang menunjukkan bahwa peringkat Indonesia berada pada posisi yang sangat buruk dalam standar audit dan kepatuhan, akuntabilitas kepada pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi (wulan, 2012).

Terdapat kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur dipasar modal menjadi bukti bahwa transparansi dan kepatuhan terhadap pengungkapan wajib masih kurang, terutama pada laporan laba rugi, misalnya yang dilakukan *mark-up* oleh PT Kimia Farma, Tbk yang *overstated*, yaitu laba pada laporan keuangan yang seharusnya Rp 99,594 miliar ditulis Rp 132,000 miliar sehingga akan terjadi penggelembungan laba bersih tahunan senilai Rp 32,668 miliar (Syahrul, 2002 dalam Utami, 2012)

Manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma, Tbk terjadi karena lemahnya penerapan *corporate governance*. Lins dan Warnock (2004) menyatakan bahwa ada dua mekanisme untuk menyamakan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer dalam rangka penerapan *corporate governance*, yaitu mekanisme internal perusahaan dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal diproksikan dengan kepemilikan manajerial, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, dan proporsi komisaris independen, sedangkan untuk mekanisme eksternal diproksikan dengan kepemilikan institusional.

Indonesia merupakan bagian integral dari program bisnis internasional atau global juga akan menghadapi masalah dalam standar atau praktik akuntansi yang mau tidak mau harus beradaptasi dengan perkembangan akuntansi yang berlaku secara internasional Dewi (2015). IFRS merupakan standar yang telah digunakan oleh lebih dari 150-an Negara, termasuk Jepang, China, Kanada dan 27 negara Uni Eropa. Indonesia mulai menerapkan standar akuntansi berbasis IFRS sejak tahun 2012. Sebelum tahun 2012 bagi perusahaan yang telah mampu

menerapkan IFRS diperbolehkan untuk menggunakan standar akuntansi internasional tersebut. sehingga berharap bahwa penggunaan IFRS dapat meningkatkan komparabilitas, transparansi, dan kualitas laporan keuangan.

Standar akuntansi internasional telah mengatur adanya pengungkapan wajib dalam laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan berbasis IFRS diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik. Sebagai contoh yaitu perusahaan emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan perusahaan BUMN. Menurut Gamayuni (2009), semua perusahaan go public dan multinasional di Indonesia mewajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS dalam penyusunan laporan keuangan pada atau setelah 1 Januari 2012.

Perusahaan di Indonesia yang menerapkan standar akuntansi keuangan berbasis IFRS maka diwajibkan untuk melakukan pengungkapan penuh (Full Disclosure). Pengungkapan harus dilakukan dengan membuat laporan keuangan atau laporan tahunan (Annual Report). Pengungkapan *annual report* merupakan pengungkapan yang sangat penting dalam dunia pasar modal. *Annual report* merupakan salah satu sumber utama mengenai informasi keuangan untuk sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi terutama oleh pemegang saham dan investor untuk menentukan tujuan investasi mereka (Belkaoui, 2000).

Meningkatnya atas tingkat kepatuhan yang diterapkan oleh perusahaan, maka perusahaan akan mengalami kenaikan tingkat pertumbuhan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Choi

dan Mueller (1997) bahwa: “meningkatnya pengungkapan dalam perusahaan akan meningkatkan distributor probabilitas subyektif dari hasil yang diharapkan suatu sekuritas di mata para investor dengan mengurangi ketidakpastian (resiko) yang berhubungan dengan aliran pengembalian tersebut. Selain itu bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja di atas rata-rata industri, pengungkapan yang lebih baik cenderung meningkatkan kepentingan relatif yang diampatkan oleh para investor pada data-data tersebut”

Meurut Suhardjanto dan Miranti (2009), terdapat dua sifat pengungkapan, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). *Mandatory disclosure* lebih mengarah pada informasi yang harus diungkapkan sebagai konsekuensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pasar saham, komisi bursa saham, atau peraturan akuntansi dari pihak yang berwenang, sedangkan *voluntary disclosure* merupakan informasi yang secara suka rela diungkapkan oleh perusahaan (Adina dan Ion, 2008).

Mandatory disclosure bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan serta memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap ketentuan hukum dan standar akuntansi yang berlaku (Adina dan Ion, 2008), memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan dan menghitung beban masa depan sehingga investor dapat menentukan kesempatan pertumbuhan jangka panjang dan memperkirakan aliran kas keluar untuk suatu bisnis (Al Akra *et al.*, 2010 dalam Pitasari, 2014). Investor akan lebih mudah memilih perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang

baik, karena terdapat peraturan yang mengatur tentang pengungkapan wajib laporan keuangan.

Penerapan standar akuntansi berbasis akuntansi IFRS yang ada di perusahaan belum tentu menjamin akan melakukan pengungkapan yang lebih tinggi. Maka dari itu diperlukan suatu sistem institusional yaitu *corporate governance* guna mengawasi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan harus dilakukan oleh suatu perusahaan karena struktur *corporate governance* di setiap negara berbeda-beda.

Corporate governance menjadi suatu hal yang penting dan untuk dilaksanakan mengingat bahwa seringnya terjadi konflik kepentingan antar pemegang saham atau komisaris serta para direktur dalam pengambilan keputusan (Hamzah dan Suparjan, 2009). Menurut Nofianti (2009), *good corporate governance* (GCG) diperlukan untuk mendorong agar terciptanya pasar yang efisien, transparan serta konsisten dengan adanya peraturan perundang-undangan.

Indonesia masih jarang melakukan penelitian tentang tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS sedangkan di luar negeri sudah banyak yang melakukan penelitian tersebut. Al Akra *et al* (2010) dalam Pitasari, 2014 melakukan penelitian mengenai pengaruh regulasi pengungkapan akuntansi, reformasi tata kelola dan perubahan kepemilikan akibat privatisasi pada kepatuhan pengungkapan wajib. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi regulasi pengungkapan menghasilkan pengaruh yang paling signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa reformasi

pemerintahan melalui mandat komite audit muncul sebagai penentu yang signifikan dari kepatuhan terhadap persyaratan pengungkapan wajib. Penelitian yang dilakukan oleh Al Akra *et al.* (2010) dalam Pitasari, 2014 variabel struktur *corporate governance* yang digunakan hanya terbatas pada ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan komite audit.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh struktur *corporate governance* yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Struktur *corporate governance* merupakan susunan organ di dalam perusahaan yang bertanggung jawab untuk menjalankan tata kelola sebagai pihak pengawas dan pihak yang menjalankan perusahaan (Prawinandi *et al.*, 2012). Inti dari *corporate governance* di Indonesia adalah pada dewan komisaris (FGGI, 2001). Oleh karena itu, struktur *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris serta komite audit yang merupakan suatu komite ada di bawah dewan komisaris.

Penelitian (Al Akra *et al.*, 2010 dalam Pitasari, 2014) telah meneliti tentang pengaruh regulasi pengungkapan akuntansi, reformasi tata kelola dan perubahan kepemilikan, akibat privatisasi, pada kepatuhan pengungkapan wajib dari sampel 80 perusahaan nonkeuangan. Namun, terdapat kelemahan dari penelitian yang dilakukan oleh (Al Akra *et al.*, 2010 dalam Pitasari, 2014), yaitu terkait hasil penelitian yang tidak dapat digeneralisasikan untuk pasar lain di luar negara Yordania. Hal ini dikarenakan pada penelitian yang dilakukan oleh Al Akra *et al.* (2010) dalam Pitasari 2014 masih didasarkan pada pasar geografis tunggal.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yang telah dilakukan oleh Al Akra *et al.* (2010) dalam Pitasari, 2014. adalah perbedaan lokasi dan sampel. Pada penelitian Al Akra *et al.* (2010) menggunakan lokasi negara Yordania dengan menggunakan perusahaan nonkeuangan sebagai sampel penelitian. Sementara untuk penelitian ini dilakukan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh lima peneliti, yaitu Pitasari dan Septiani (2014), menyebutkan bahwa struktur *corporate governance* yang berpengaruh signifikan adalah anggota komite audit dan jumlah rapat komite audit, sedangkan anggota dewan komisaris, komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan. penelitian yang dilakukan oleh Utami (2012) menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS, dan penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi (2012) menyimpulkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif, sedangkan anggota dewan komisaris tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Objek penelitian ini adalah laporan tahunan pada perusahaan manufaktur yang memiliki tingkat *mandatory disclosure* yang tinggi. Penelitian ini diperhatikan oleh stakeholders dalam laporan tahunan sebagai pedoman mereka dalam mengambil keputusan. Selain itu, dalam laporan keuangan dapat menggambarkan kinerja perusahaan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS?
2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS?
3. Apakah jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS?
5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah anggota Dewan Komisaris terhadap *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
2. Untuk menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen terhadap *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah anggota komite audit terhadap *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

4. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
5. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

1.4. **Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan manufaktur yang telah *go public*, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi manajemen mengenai mekanisme *corporate governance* kaitannya dengan pengungkapan wajib.
2. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang pengungkapan wajib dalam laporan keuangan tahunan kaitannya dalam pengambilan keputusan ekonomi.
3. Bagi pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkait, penelitian dapat digunakan sebagai pendorong untuk menetapkan kebijakan ataupun standar pengungkapan wajib yang lebih baik.
4. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai struktur *corporate governance* yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan proposal ini secara sistematis dibagi dalam lima bab, dimana masing-masing bab berbagi menjadi beberapa sub bab antara satu dengan yang lainnya terdapat keterkaitan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memberikan penjelasan tentang latarbelakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab telaah pustaka memberikan penjelasan tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, uraian tentang penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis untuk memberi penjelasan secara logis maksud dari penelitian, dilanjutkan dengan penjelasan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian memberikan penjelasan tentang desain penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV: GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang gambaran subyek penelitian dan analisis data yang memuat analisis dari hasil penelitian dalam bentuk analisis deskriptif, analisis statistik dan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir, keterbatasan penelitian dan saran.